

# **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH**

*The Effect of Economic Growth, Revenue and General Allocation Fund Capital Expenditure Against Appropriations*

**BAITI IZZATINISA**  
**8335097700**

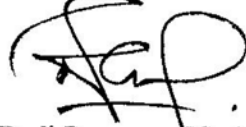


**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

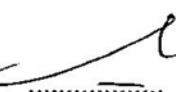




**Program Studi S1 Akuntansi**  
**Jurusan Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Negeri Jakarta**  
**2014**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas ekonomi



Drs. Dedi Purwana ES., M.Bus  
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Indra Pahala, SE., M.Si</u> NIP. 19790208 200812 1 001	Ketua Penguji		.....
<u>Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA.</u> NIP. 1976017 200112 2 001	Sekretaris		7 Juli 2014
<u>Marsellisa Nindito, SE, Akt.M.Sc</u> NIP : 19750630 200501 2 001	Penguji Ahli		.....
<u>Dra. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Pembimbing I		.....
<u>Yunika Murdayanti, SE, M.Si, Ak</u> NIP. 19780621200801 2 011	Pembimbing II		.....

Tanggal lulus: Selasa, 7 Juli 2014

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan Karya tulis asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini belum pernah di publikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan
4. norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 29 Juni 2014  
Yang membuat pernyataan

Baiti Izzatinisa  
NIM : 8335097700

## **ABSTRAK**

***Baiti Izzatinisa, 2014: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.***

*Pelaksanaan desentralisasi fiskal, selain memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah juga mempengaruhi daerah untuk memenuhi kemampuan daerah untuk memenuhi kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.*

*Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 93 Provinsi di seluruh Indonesia yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling.*

*Hasil pengujian menunjukan bahwa semua variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.*

***Kata Kunci :PertumbuhanEkonomi, PendapatanAsli Daerah (PAD), Dana AlokasiUmum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal***

## **ABSTRAC**

***Baiti Izzatinisa, 2014: Economic Growth, Regional Revenue and General Allocation Fund Capital Expenditure Against Appropriations***

*Implementation desentral ization fiscal, besides giving authority to the Local Government also affects the area to meet the region's ability to meet the public interest that this study aims to examine the influence of Economic Growth, Regional Revenue and General Allocation Fund Capital Expenditure Against Appropriations.*

*The sample used in the study was 93 province in Indonesia that is retrieved by using purposive sampling method.*

*The test results showed that all the variables of Economic Growth, Regional Revenue and General Allocation Fund significantly influence the allocation of Capital Expenditure Budget.*

***Keywords: Economic Growth, Revenue, General Allocation Fund, Capital Expenditure Against Budget Allocation***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrack .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xii</b>
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	11
D. Perumusan Masalah .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>Bab II Kajian Teorerik .....</b>	<b>14</b>
A. Deskriptisi Konseptual .....	14
1. Belanja Modal .....	14
1.1 Pengertian Belanja Modal .....	14
1.2 Klasifikasi Belanja Daerah.....	16
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	17
3. Pendapatan Asli Daerah .....	19
3.1 Sumber Penerimaan Daerah.....	21
3.2 Pajak Daerah .....	22
3.3 Retribusi Daerah.....	23
3.4 Hasil Perusahaan Milik Daerah.....	23
3.5 Lain-Lain PAD yang Sah.....	24
4. Dana Alokasi Umum.....	26
B. Hasil Penelitian yang <i>Relevan</i> .....	28
C. Kerangka Teoretik .....	29
D. Perumusan Hipotesis .....	32
<b>Bab III Objek dan Metodologi Penelitian.....</b>	<b>34</b>
A. Tujuan Penelitian .....	34
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	34
C. Metode Penelitian.....	35
D. Populasi Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	38
1. Statistik Deskriptif .....	38
1.1 Pengujian Asumsi Klasik .....	38
2. Analisis Regresi Linear Berganda.....	42

2.2 Uji Hipotesis.....	43
<b>Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Unit Analisis / Observasi .....	45
4.1.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	46
B. Pengujian Hipotesis .....	49
4.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	49
4.2.2 Uji Normalitas .....	49
4.2.3 Uji Multikolonieritas .....	52
4.2.4 Uji Heterokedastisitas .....	54
4.2.5..... Uji	
Autokorelasi .....	56
4.2.6 Analisis Regresi Linier Berganda .....	57
4.2.7 Uji Statistik t dan F .....	59
4.2.8 Uji koefisien determinasi.....	62
C. Pembahasan .....	63
4.5.1 Pertumbuhan EkonomiMempengaruhiPengalokasian anggaran Belanja Modal .....	63
4.5.2 PAD Mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.....	65
4.5.3 Dana Alokasi UmumMempengaruhiPengalokasian Anggaran Belanja Modal.....	68
4.5.4 Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Alokasi umum MempengaruhiPengalokasian Anggaran Belanja Modal	70
<b>Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Saran .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Implikasi .....	75
C. Saran .....	76

**Lampiran-Lampiran**  
**Daftar Pustaka**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Data Dari BPS	5
1.2	Review Penelitian Terdahulu	28
4.1	Uji Statistik Deskriptif	46
4.2	Uji Normalitas	51
4.3	Uji Kolmogorovsmirnov	53
4.4	Uji Multikoleranitas	54
4.5	Uji Gletjser	55
4.6	Uji Autokorelasi	56
4.7	Analisis Regresi Linear Berganda	57
4.8	Uji t	60
4.9	Uji f	62
4.10	Uji Koefisien Determinasi	63



## DAFTAR GAMBAR

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Penelitian	37
4.1	Uji Probability Plot	52
4.2	Grafik Scatterplots	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Data Realisasi tahun 2010	80
2.	Data Realisasi Tahun 2011	83
3.	Data Realisasi Tahun 2012	84
4.	Data dari Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Ekonomi	88
5.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	100
6.	Hasil Casewise Diagnostics	100
7.	Grafik Histogram	100
8.	Hasil Uji Normalitas dengan Skewness Kurtosis	101
9.	Hasil Uji Normal Probability Plots	101
10.	Hasil Uji Normal dengan Kolmogorovsmirnov	102
11.	Hasil Uji Multikolerasi	102
12.	Hasil Uji Heterokedasitas	103
13.	Hasil Uji Autokorelasi	103
14.	Hasil Regresi Linear Berganda	103
15.	Hasil Uji t	104
16.	Hasil Uji f	104
17.	Hasil Uji Koefisien Determinasi	104

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”**. Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Keberhasilan menyelesaikan proposal skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Dedi Purwana, ES,M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Ibu Dra. Etty Gurendrawati, SE, Akt, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar untuk keberhasilan penulisan proposal ini.
5. Ibu Yunika Murdayanti, SE, Akt, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membantu dan meluangkan waktu dengan sabar untuk keberhasilan penulisan proposal ini.

6. Andhika Prahmadita selaku teman yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman S1 Akuntansi non reg 2009 khusus nya Nandya Vivi Artantri, Tami Yoseva, Intan Purnama dan Irene mareta yang telah banyak memberikan dukungan.
8. Baitil Atiq, Tuti Awaliyah Ulfah, Jamalulaidin dan Ricky sebagai kakak saya yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moril maupun materil.
10. Seluruh dosen FE UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juni 2014

Baiti Izzatinisa

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang pemerintahan daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Berdasarkan pembedaan tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif menjadi hubungan keagenan. Secara implisit, peraturan perundangan-undangan merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif dan publik.

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk menghasilkan kapasitas pemerintahan yang memiliki kemampuan yang handal dan professional. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota harus dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien agar tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah.

Kemandirian keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi daerah terutama terkait dengan kontribusi keuangan daerah itu sendiri. Besarnya

kontribusi pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan secara sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum tentang APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan

bentuk kontrak, yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan sebuah kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khaemani, 2003).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintahan daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal

mungkin di dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Alokasi belanja modal ini berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa kemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik.

Belanja Modal sebagai bentuk yang fundamental di dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mulai pasca reformasi dengan di dasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama UU No. 22/1999, UU No. 25.1999, PP No. 105/2000, dan PP NO. 108/2000 (Halim, 2002). Sebelumnya didalam APBD, pengalokasian untuk jenis belanja berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan.



Layaknya belanja pembangunan, belanja modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan asset daerah sebagai investasi, dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan sumber dari hasil BPK, gambaran belanja modal pada 25 kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2007. Rata-rata Belanja Modal adalah 21,69% dari keseluruhan belanja daerah, dengan rincian 10 pemda telah melakukan belanja modal diatas rata-rata dan sisanya yaitu 15 pemda yang melakukan belanja modal dibawah rata-rata.

**Tabel 1.1**

**Data dari BPS**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2010</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Tahun 2012</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	5.622.864.000.000	6.316.400.000.000	8.176.353.000.000
<b>Dana Alokasi Umum</b>	1.086.124.000.000	1.181.553.000.000	1.269.961.000.000
<b>Belanja Modal</b>	1.131.750.000.000	765.273.000.000	1.284.574.000.000

Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id) (2013)

Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006). Menurut Halim (2007), dengan melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Akan tetapi berdasarkan hasil audit BPK Pemda lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik, sebab dari 100% belanja daerah rata-rata hanya 21,69% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka penggandaan asset untuk investasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008). Selama ini, Pemerintah

Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal.

Akan tetapi dengan melihat fenomena yang terjadi sepertinya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. (Halim dan Abdullah, 2006) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah dimasyarakat.

Padahal menurut pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa : “ keuangan daerah dikelola secara tertib pada peraturan perundang-undangan efisien, efektif, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”. UU tersebut mengisyaratkan kepada Pemda untuk mengelola keuangan daerah terutama belanja modal secara efektif, efisien, dan ekonomis dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pernyataan sesuai dengan konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) yang disampaikan oleh (Halim dan Abdullah, 2006) yang menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan pemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget Capability) dalam pengelolaan asset

tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berarti bahwa dalam pengelolaan asset terkait dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Keleluasaan tersebut harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah rendah sekali, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintahan daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian rendah, campur tangan pemerintahan pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori sedang, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori tinggi, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. (BPS, Keuangan Pemerintah Provinsi 2009-2012:32).

PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan PAD yang mencukupi akan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak perlu bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Pada studi yang dilakukan oleh legrenzi & mila (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwasannya dalam jangka panjang, transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, dengan sampel pemerintah kabupaten/ kota yang ada di propinsi Jawa dan Bali, selain itu penelitian ini juga hanya dilakukan pada periode 2004-2005. Terdapat beberapa saran yang disebutkan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan menambah rentang waktu yang lebih panjang. Oleh sebab itu peneliti akan meneliti

dalam rentang waktu yang lebih luas dengan mengambil sampel kabupaten/kota di perluas dengan menjadi provinsi seluruh Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Provinsi seluruh Indonesia.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi, pendaptan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.
2. Alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik.
3. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian dapat lebih terfokus dan terarah maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada :

1. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa deskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
2. kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan.
3. Jumlah dan kenaikan PAD yang mencukupi akan meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak perlu bergantung pada pemerintah pusat.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka permasalahan dapat diidentifikasi terkait sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?



2. Apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penelitian ini adalah:

##### **1. Bidang Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan hubungan antar variabel secara empiris di lapangan dari konsep-konsep yang ada sehingga mampu mendukung pengembangan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

##### **2. Bidang Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja modal serta menjadi pembelajaran evaluasi untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan akan saran dan prasarana di daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Deskriptif Konseptual**

Sebelum mengetahui kajian pustaka pada penulisan skripsi ini, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Belanja Modal, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal.

#### **1. Belanja Modal**

##### **a. Pengertian Belanja Modal**

Menurut Halim (2004, hal.70), belanja daerah adalah “pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.” Menurut UU No. 32 tahun 2004 belanja daerah adalah “semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Syukriy Abdullah, Abdul Halim, 2006).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Yani, 2008).

Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) yaitu:

1. Belanja Modal Tanah,
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya.

Jumlah nilai belanja yang di kapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

#### **b. Klasifikasi Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13/2006 terdiri atas : Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. belanja pegawai,
2. bunga,
3. subsidi,
4. hibah,
5. bantuan

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Menurut Halim (2004, hal.18), belanja daerah digolongkan menjadi 4, yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah

diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu. Karena suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi adalah suatu adalah untuk menghaikan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB (Saragih,

2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik Lin dan Liu (2000); Mardiasmo (2002) dan Wong (2004).

Berdasarkan pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi “Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agency*-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani (2003) dan Mauro (2002), secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi *self-interestnya*.

Penertian PDRB yang dikeluarkan oleh BPS yang dikutip Hasnaria, (2008, hal.5) yaitu:

- 1) Menurut pengertian produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (*region*) dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- 2) Menurut pengertian pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah, gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian Produk Domestik Regional Bruto, kecuali faktor pendapatan diatas, termasuk pula komponen penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto. Semua komponen pendapatan ini secara sektoral disebut Nilai Tambah Bruto, sehingga Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai penjumlahan pada nilai tambah dari seluruh sektor (lapangan usaha).
- 3) Menurut pengertian pengeluaran, PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan

kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (GBHN, 1999) merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Menurut Soekarwo (2003) pada dasarnya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dilakukan dengan cara tiga cara yaitu:

- 1) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.
- 2) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.



- 3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Menurut Saragih (2003, hal.65), “semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar”. Namun tentunya hal ini harus didukung kesadaran maupun kepedulian masyarakat atas.

Menurut Mardiasmo (2002, hal.132),” Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

#### **a. Sumber Penerimaan Daerah**

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.” Menurut Halim (2004, hal.67),

“PAD dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.

Berdasarkan UU NO 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Dalam kenyataannya PAD belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari system tax assigment di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (Utang Rosidin, 2010, hal.230).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (Yuwono, 2005, hal.107) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

#### **b. Pajak Daerah**

Yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung (Saragih, 2003, hal.61) yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Jenis-jenis pajak daerah untuk Kabupaten/ Kota menurut Kadjarmiko (2002, hal. 77) antara lain ialah:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
7. Pajak parkir.

#### **c. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah menurut Saragih (2003, hal.65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

#### **d. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan**

Menurut Halim (2004, hal.68), “Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Menurut Halim (2004, hal. 68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: “

- 1) bagian laba perusahaan milik daerah,
- 2) bagian laba lembaga keuangan bank,
- 3) bagian laba lembaga keuangan non bank,
- 4) bagian laba atas penyertaan modal/ investasi”.

**e. Lain-Lain PAD yang Sah**

Menurut Halim (2004, hal.69), “Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Menurut Halim (2004, hal.69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, “

- 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) penerimaan jasa giro,
- 3) penerimaan bunga deposito,
- 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah”.

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13/ 2006 pasal 26 ayat 1-5 adalah terdiri dari : Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek

pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

Menurut Soekarwo (2003 : 95), kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Daerah. Semakin besar upaya maksimalisasi Pendapatan Asli daerah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru.

#### **4. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi

pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No.33 Tahun 2004).

Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. “Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia”. (Kuncoro, 2004, hal.30).

Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapital fiskal;
- 2) instrumen untuk mengatasi *horizontal balance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah;

- 3) *equalization grant* berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah. (Kuncoro, 2004, Hal.29).

## B. Hasil Penelitian yang Relevan

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Relevan**

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Sri Puji Paujiah (2010)	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Variabel Dependen: Belanja Modal	PAD & DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal
Darwanto & Yulia Yustikasari (2007)	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL	Variabel Dependen: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Variabel Independen: PDRB per kapita, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum	Secara Parsial hanya PAD & DAU yang berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal, Secara Simultan PDRB, PAD & DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
Ulfi Maryati & Endrawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat)	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi, Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)	PAD & DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAK tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Srikandi Cipto Mangunkusumo (2012)	ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (ABD) (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa Periode 2009-2011)	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Variabel Dependen : Alokasi Belanja Daerah	secara simultan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah
Askam Tuasikal (2008)	PENGARUH DAU, DAK, PAD, DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA	Variabel Dependen: Belanja Modal, Variabel Independen: DAU, DAK, PDRB & PAD	Secara simultan, temuan penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Anggaran Daerah rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan merupakan output pengalokasian sumberdaya. Keterbatasan sumber daya adalah pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran daerah. Hal ini

dapat diatasi dengan menciptakan manajemen pelayanan publik yang terencana dengan baik.

Pemerintahan daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik dalam kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut. Posisi keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada daerah tersebut.

Pada bagian pertama menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal. Setiap pemerintahan kabupaten/kota pasti menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi di daerah yang ada di bawah perintah atau wewenangannya. Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan kredibilitas/campur tangan pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintahan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah bukti nyata hasil usaha/kerja pemerintahan daerah dalam menunjukkan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana tersebut bias didapat dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Bila

pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut, semakin baik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka semakin menuntut pemerintahan daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya semakin banyak lagi.

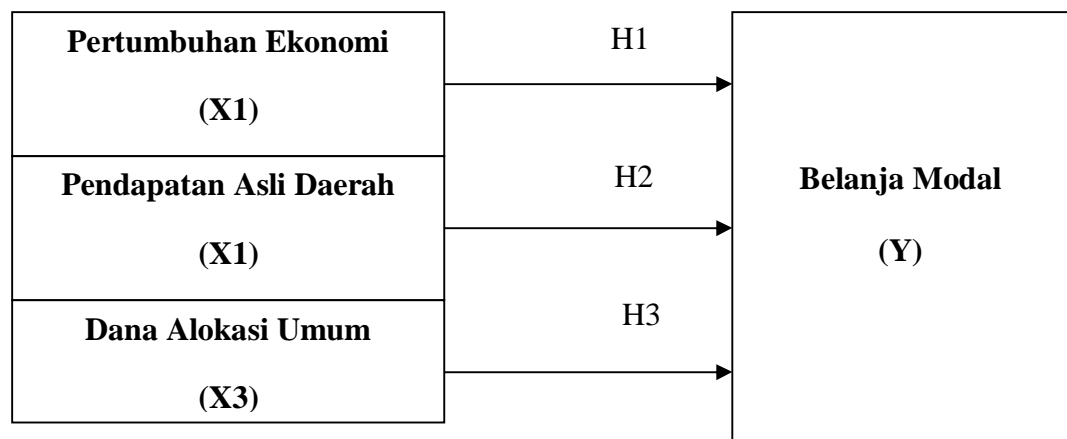
Bagian kedua menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastuktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bias mengembangkan dan meningkatkan PAD nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah semakin besar pula alokasi belanja modalnya.

Yang terakhir menjelaskan hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dari dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah yang

kemampuan keuangannya lemah akan mengandalkan DAU untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena DAU juga merupakan salah satu pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, semakin kecil DAU yang diperoleh semakin kecil pula alokasi belanja modal.

Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Kerangka Penelitian**



Sumber: Data Diolah Penulis (2013)

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka peneliti membuat hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintahan seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan kajian pustaka dan review penelitian relevan yang telah diuraikan, maka hipotesis nya sebagai berikut:

- H1: Pertumbuhan Ekonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasi anggaran belanja modal.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teoritik diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Pengaruh dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

#### **B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah 33 provinsi di seluruh Indonesia. Variabel yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan belanja modal dengan periode penelitian 2010-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan realisasi APBD yang diperoleh melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta data pertumbuhan ekonomi yang diperoleh melalui *website* Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Istijanto (2005 ) data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan merupakan peneliti sendiri, dalam hal arti bahwa peneliti mencatat, mengakses atau meminta data tersebut kepada pihak yang telah mengumpulkan dilapangan.

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintahan seluruh provinsi di Indonesia Tahun (2010-2012) yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) . Sementara itu Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Menurut Seluruh provinsi di Indonesia diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

### **D. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, kejadian atau sesuatu yang menarik (Sekaran, 2003:265). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang telah memiliki data PAD, DAU dan pebgalokasian anggaran belanja modal diperoleh melalui laporan realisasi APBD, serta pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui Badan Pusat Statistik.

Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, dimana sampel penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti dan kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Daerah yang menyerahkan laporan realisasi anggaran minimal laporan realisasi anggaran dan perencanaan anggaran tahun 2010-2012.
- b. Data PDRB yang melalui Badan Pusat Statistik mencakup seluruh provinsi di Indonesia tahun 2010-2012.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel terikatnya adalah Belanja Modal. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat sebagai berikut:

##### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah atas dasar harga berlaku dari berbagai



sektor yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \text{Pertanian} + \text{Perambangan} + \text{Industri} \\ \text{Pengelolaan} + \text{Listrik dan Air Bersih} + \text{Bangunan} + \text{Perdagangan} + \\ \text{Pengangkutan dan Komunikasi} + \text{Keuangan, Persewaan} + \text{Jasa-} \\ \text{jasa}$$

#### **b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS) yang dirumuskan dengan:

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

#### **c. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

#### e. Belanja Modal

Adalah pengeluaran untuk memperoleh asset (asset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator variabel ini diukur dengan :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan} \\ & \text{Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \\ & \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \\ & \text{Belanja Asset Lainnya} \end{aligned}$$

### F. Teknik Analisis Data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier ialah ialah:

#### 1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011, hal.19), statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi,

maksimum dan minimum. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan menggunakan program SPSS 19.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

### **a. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011,hal.160). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal.

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi tidak normal. maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Normalitas yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 3 metode yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) dan analisis statistik (analisis skewness dan kurtosis) dan juga one sample Kolmogorov-Smirnov Test.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat

histogram dari residualnya, Ghazali (2011 : 163). Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi tidak normal. maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Penggunaan beberapa variabel bebas memungkinkan terjadinya multikolinearitas. Menurut Nachrowi (2006, hal.95). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011, hal.105). Multikolinearitas adalah hubungan linear antara variabel bebas.

Dalam membuat model regresi berganda, variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya. jika ada variabel bebas yang berkorelasi sudah pasti setiap perubahan suatu variabel bebas akan merubah variabel bebas lainnya. Ada beberapa cara mendeteksi multikolinearitas, antara lain :

- a. *Variance Inflation Factor* dan *Tolerance*

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

- 1) Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$  artinya mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau nilai VIF  $> 10$  artinya mengindikasikan terjadi multikolonieritas.

#### c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011, hal.139). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat scatter plot (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID), uji Gletjer, uji Park, dan uji White.

Analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karna jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting oleh sebab itu uji statistik yang lebih untuk menjamin keakuratannya. Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

#### d. Uji Autokorelasi

Menurut Nachrowi (2006, hal.183) autokorelasi secara harfiah dapat disebut sebagai korelasi yang terjadi antara observasi dalam satu variabel. Autokorelasi dapat terjadi jika adanya observasi yang berturut-turut sepanjang waktu mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Dengan adanya uji autokorelasi ini diharapkan *error* tidak saling berkorelasi antara satu observasi dengan observasi lainnya. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi yaitu dengan menggunakan *Uji Durbin Watson* (DW). Koefisien autokorelasi mempunyai nilai  $-1 \leq \rho \leq 1$  sedangkan nilai statistic *Durbin Watson* yaitu  $0 \leq d \leq 4$ , sehingga dapat diartikan bahwa :

- a. Jika statistic DW bernilai 2, maka  $\rho$  akan bernilai 0 yang berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Jika statistic DW bernilai 0, maka  $\rho$  akan bernilai 1, yang berarti ada autokorelasi positif.
- c. Jika statistic DW bernilai 4, maka  $\rho$  akan bernilai -1, yang berarti ada autokorelasi negatif.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui arah hubungan apakah terdapat hubungan positif atau negatif dari masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen yang mengalami kenaikan atau penurunan.

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, yaitu:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Dimana,

Y : Belanja Modal

a : Konstanta

X1 : Pertumbuhan Ekonomi

X2 : Pendapatan Asli Daerah

X3 : Dana Alokasi Umum

B1 : Koefisien Regresi Pertumbuhan Ekonomi

B2 : Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah

B3 : Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum

e : Error

#### **4. Uji Hipotesis**

##### **a. Pengujian Simultan (Uji-F)**

Nachrowi (2006, hal.20) menyatakan bahwa uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. Hasil dari F

*hitung* akan dibandingkan dengan *F tabel*. Jika *F hitung* lebih besar dari *F tabel* maka ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent.\

#### **b. Pengujian Parsial (Uji-t)**

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka selanjutnya menghitung koefisien regresi secara individu (Nachrowi, 2006). Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependent dengan asumsi variabel lainnya konstan. hasil dari *T hitung* akan dibandingkan dengan *T tabel*. Jika  $T_{hitung} > T_{tabel}$  maka hipotesis nol ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa  $H_0$  adalah variabel secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

### **5. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*) yang dinotasikan dengan  $R^2$ , suatu ukuran yang penting dalam regresi untuk menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi (Nachrowi, 2006). Menurut nachrowi (2006), koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa dekatnya garis regresi yang terestimasi dengan data yang sesungguhnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Unit Analisis/Observasi**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dalam menganalisa dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia dengan data penelitian laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2010-2012. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan yaitu:

1. Provinsi yang menyerahkan laporan realisasi anggaran minimal laporan realisasi anggaran dan perencanaan anggaran tahun 2010 dan 2012.
2. Provinsi yang mempunyai kelengkapan data yang diperlukan untuk pengukuran variabel.

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan analisis statistik. Pengujian hipotesis menggunakan statistik melalui program SPSS 19.0. Hasil analisis memberikan informasi pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Dalam hal ini peneliti mengambil waktu penelitian selama tiga tahun yaitu tahun 2010-2012 maka berdasarkan jumlah sampel tersebut akan

menghasilkan jumlah observasi pengamatan sebanyak 93 Provinsi. Nama-nama pemerintah daerah sampel dapat dilihat pada Lampiran 1.

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari variabel.

Dengan melakukan uji ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai penelitian seperti nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi.

Statistik deskriptif dari 93 observasi pemerintah daerah yang dijadikan sebagai sample dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel 4. 2  
Uji Statistik deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	93	108,996.10610	3,267,911.38700	580,952.09952	478,918.60543
PDRB	93	5.39000	1,001.72100	150.24906	223.81875
PAD	93	77,842.74279	9,982,920.00000	1,696,050.47236	2,243,409.45434
DAU	93	49,231.90805	1,569,780.00000	719,526.89707	286,920.94591
Valid N (listwise)	93				

Sumber :SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Belanja Modal

Belanja Modal memiliki nilai minimum 108,996.10 Provinsi Gorontalo pada tahun 2010, hal ini terjadi karena PAD yang dihasilkan masih relatif kecil, sehingga hal tersebut berpengaruh sekali terhadap belanja modal. Penyebab rendahnya Belanja Modal diantaranya keterlambatan dalam tender, termin pembayaran yang belum jatuh tempo, maupun kesengajaan pemerintah daerah menahan dana untuk dibungakan.

Bilamana penyebabnya adalah termin pembayaran yang belum jatuh tempo, maka kondisi tersebut lumrah, namun bila penyebabnya adalah keterlambatan tender dan kesengajaan menahan dana, maka kondisi ini tidak mendukung tujuan desentralisasi fiskal untuk percepatan pencapaian perluasan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan untuk nilai maksimum 3,267,911.387 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ini terjadi karena pada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki belanja pegawai dan belanja infrastruktur pemerintah sangatlah besar. Besarnya alokasi tersebut akibat adanya tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2006 sehingga pemerintah dengan itu menaikkan belanja modal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerahnya. Namun faktor selain itu adalah dana hibah yang berasal dari luar negeri pasca terjadinya bencana tsunami. Adapun rata-rata Belanja Modal yaitu 580,952.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum 5.39 Provinsi Jambi 2010 karena hal ini disebabkan oleh ketidak optimalan pendapatan asli daerah. PAD tidak berkontribusi dengan baik karena belum mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Nilai maksimum 1001.721 diperoleh provinsi Jawa Timur 2012 ini menunjukkan perkembangan ekonomi Jawa Timur tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi, meski sedikit mengalami perlambatan. Beberapa

fenomena ekonomi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur antara lain kondisi perekonomian Indonesia yang cukup baik dan mampu dijaga relatif stabil di level yang cukup tinggi di tengah gejolak ekonomi global. Perkembangan kinerja LPE bervariasi dari tahun ke tahun seiring dengan dinamika perekonomian nasional dan global. Ekonomi Jawa Timur sama halnya dengan ekonomi nasional bercirikan *domestic-demand led growth*, dimana dominasi utama berasal dari konsumsi rumah tangga. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 150.24906 dengan jumlah sampel sebanyak 93.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum 77,842.74 Provinsi Maluku Utara 2010 ini diakibatkan oleh tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran daerah. Rasio ketergantungan daerah dicerminkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin rendah ketergantungan daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer, semakin tinggi rasio transfer semakin tinggi ketergantungan daerah. Hal ini dikarenakan Provinsi Maluku Utara memiliki pajak dan retribusi yang masih sangat rendah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat rendah.

Untuk nilai maksimum diperoleh Jawa Barat dengan 9,982,920 Provinsi Jawa Barat 2012. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi

Jawa Barat sudah efektif dalam melakukan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Rata-rata sebesar 1,696,050.47.

#### 4. Dana Alokasi umum

Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum 49,231.90 Provinsi Papua 2012. Hal ini terjadi karena Papua belum bisa memaksimalkan potensi daerah sehingga sedikitnya alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini bukan suatu keuntungan untuk Papua karena dengan dana alokasi umum seharusnya bisa membantu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai maksimum untuk DAU diperoleh Provinsi Papua 1,569,780 pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memerhatikan pembangunan di Provinsi Papua karena memang masih sangat tertinggal dengan provinsi-provinsi lainnya. Rata-rata sebesar 719,526.89.

### 4. 2. 2 Uji Asumsi Klasik

#### 4. 2. 2. 1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan uji *Skewness* dan *Kurtosis*, uji *Normal Probability Plot* dan uji *kolmogorov smirnov*.

Dalam memperjelas sebaran data agar tidak terdapat bias hal pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan uji normalitas *Skewness* dan *Kurtosis*. Dalam proses *collecting data*, *researcher* sering menemukan nilai pengamatan yang bervariasi (beragam). Keberagaman data ini, di satu sisi sangat dibutuhkan dalam analisa statistika, namun di sisi yang lain keberagaman data menyebabkan adanya nilai pengamatan yang berbeda dengan nilai pengamatan lainnya.

Dengan kata lain terdapat beberapa data yang berbeda dengan pola keseluruhan data. Penyebabnya mungkin terdapat kesalahan pada pengamatan, pencatatan, maupun kesalahan yang lain. Data yang berbeda ini disebut sebagai *outlier* atau *data pencilan*. *Outlier*/anomali adalah sehimpunan data yang dianggap memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan data lainnya. Analisis outlier dikenal juga dengan analisis anomali atau deteksi anomali atau deteksi deviasi (nilai atributnya objek tsb, signifikan berbeda dengan nilai atribut objek lainnya ) atau *exception mining*. Data yang di buang dalam penelitian ini adalah no 1 merupakan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki *outlier* dengan nilai kisaran z-score berada diantara 3-4 jika memiliki sampel lebih dari 80..

Cara menganalisis uji ini dengan cara membagi nilai rasio *skewness* dengan standar *error* rasio *skewness* serta membagi nilai rasio kurtosis

dengan standar *error kurtosis* dari data residual. Jika nilai dari hasil pembagian tersebut berada diantara  $\pm 1,96$  untuk tingkat signifikansi 5% maka dapat dinyatakan bahwa data residual tersebut berdistribusi normal dan jika hasil pembagian data tersebut diluar antara nilai  $\pm 1,96$  untuk tingkat signifikansi 5% maka dapat dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 3  
Uji *Skewness* dan *Kurtosis*  
**Descriptive Statistics**

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	92	.170	.251	-.188	.498
Valid N (listwise)	92				

Sumber :SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Dari tabel 4.3 maka dapat diketahui nilai *skewness* dan *kurtosis* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Skewness = \text{nilai skewness} / \sqrt{(6/n)}$$

$$= \frac{0,170}{\sqrt{\frac{6}{92}}} = 0,666$$

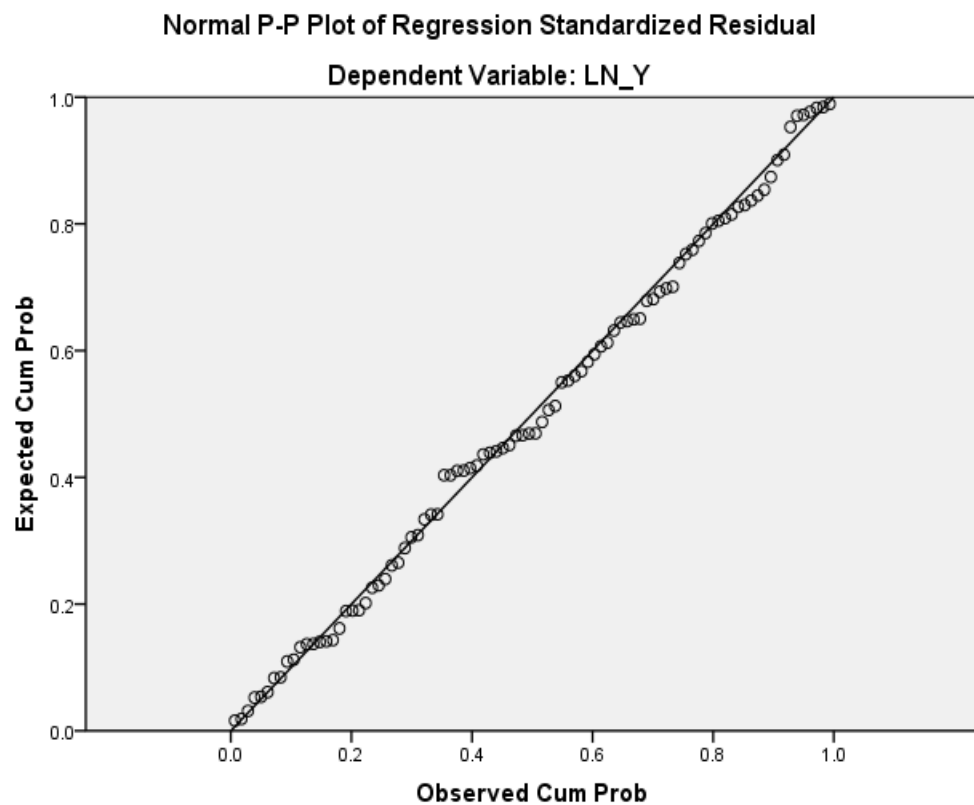
$$Kurtosis = \text{nilai kurtosis} / \sqrt{(56/n)}$$

$$= \frac{-0,188}{\sqrt{\frac{24}{92}}} = 0,368$$

Berdasarkan perhitungan di atas, *skewness* dan *kurtosis* mempunyai nilai berturut-turut sebesar = 0,666 dan 0,368. Nilai-nilai tersebut berada diantara  $\pm 1,96$  yang berarti data penelitian berdistribusi normal.

Selain itu untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal maka dapat dilakukan Uji *Normal Probability Plot* di mana dalam uji ini data berdistribusi normal jika titik-titik pada grafik *normal plot* menyebar tidak menjauhi garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 4. 1 Uji *Probability Plot*



Sumber :SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Berdasarkan gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal karena penyebaran titik-titik berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut



Selain menggunakan uji normalitas dengan menggunakan nilai *dariskewness* dengan *kurtosis* dapat dilihat dari uji *ProbabilityPlot*, pengujian normalitas dapat menggunakan uji statistik non-parametrik *kolmogorovsmirnov*. Hasil uji *kolmogorovsmirnov* dapat dilihat ditabel berikut 4.4. Hasil uji *kolmogorov* didapatkan bahwa *asyp. sig* sebesar 0,952 hal ini menunjukkan bahwa data yang ada terdistribusi dengan normal karena lebih besar dari 0,05.

**Tabel 4. 4**  
**Uji KolmogorovSmirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.48903209
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.042
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.517
Asymp. Sig. (2-tailed)		.952

Sumber :SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

#### 4.2.2.2 Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *varianceinflationfactor* (VIF). Nilai umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* >0,10 atau

sama dengan nilai  $VIF < 10$ . Berikut adalah hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan.

**Tabel. 4. 5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_PE	.126	7.917
	LN_PAD	.130	7.673
	LN_DAU	.916	1.092

Sumber :SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Dari tabel 4. 5 dapat dipastikan bahwa variabel dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolineritas karena nilai VIF dari tiap variabel masih berada  $< 10$  dengan nilai toleransi  $> 0,1$ .

#### 4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

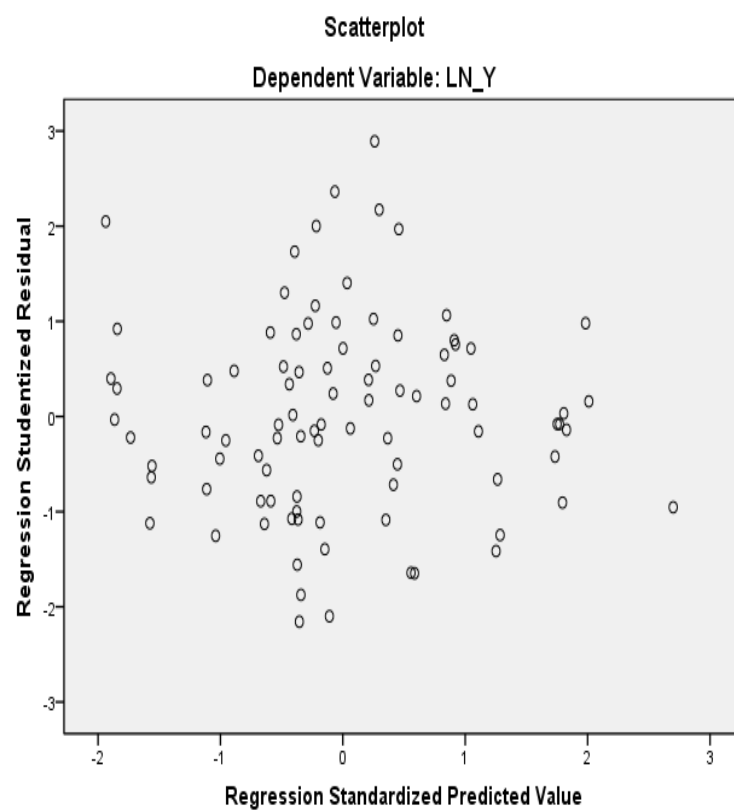
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk melihat apakah terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak, salah satunya dengan menggunakan uji *gletser*. Jika hasil signifikansi berada diatas 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel. 4.6  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.810	1.173		1.543	.126
LN_PE	.023	.071	.096	.324	.746
LN_PAD	-.046	.073	-.186	-.639	.525
LN_DAU	-.066	.064	-.114	-1.037	.303

Dari tabel 4.6 dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya berada lebih besar dari 5%.

Gambar. 4.2  
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber :SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Berdasarkan dari gambar 4.2 hasil scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak (randem) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4. 2. 2. 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan *durbinwatson*, yaitu dengan menggunakan angka *durbinwatson* yang didapat dari hasil pengujian, kemudian dibandingkan dengan tabel *durbinwatson*. Berikut adalah tabel hasil dari uji *durbinwatson*.

Tabel 4. 7  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.733 <sup>a</sup>	.538	.522	.49730	1.889

Sumber :SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Berdasarkan table 4. 7, hasil pengujian *Durbin-Watson* di dapat nilai  $dl=1.5941$  dan  $du=1.7285$  sehingga nilai  $4-dl=2.4059$  dan  $4-du=2.2715$ . Nilai  $d(1.889)$  terletak diantara  $du$  dan  $4-du$  ( $1.7285 < d < 2.2715$ ) yang berarti model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

### 4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, dapatkan hasil regresi sebagai berikut :

Tabel 4. 8  
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	16.652	1.959
	LN_PE	.659	.118
	LN_PAD	-.256	.121
	LN_DAU	-.222	.107

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4. 8, dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 16.652 + 0.659 \text{ PE} - 0.256 \text{ PAD} - 0.222 \text{ DAU} + e$$

Dimana :

Y = Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Ekonomi

X<sub>2</sub> = Pendapatan Asli Daerah

X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Umum

e = Error

Dari persamaan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar Rp 16.652,00 atau setara dengan Rp. 16.652.000.000, artinya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tetap (konstan) maka alokasi belanja modal adalah sebesar Rp16.652 dalam jutaan rupiah. Hal tersebut menandakan alokasi belanja modal tetap akan terjadi sebesar Rp 16.652.000.000 pada provinsi pada periode 2010 dan 2012.
2. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,659, artinya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka pengalokasian anggaran belanja modal akan meningkat sebesar 0,659. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi Rp. 1.000 diprediksi akan meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modal Rp. 659. Koefisien bertanda positif yang berarti apabila pertumbuhan ekonomi bertambah maka pengalokasian anggaran belanja modal pada provinsi akan bertambah.
3. Koefisien pendapatan asli daerah sebesar -0,256, artinya ketika pendapatan asli daerah meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka pengalokasian anggaran belanja modal akan menurun sebesar 0,256. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan pinjaman daerah Rp. 1.000 diprediksi akan meningkatkan alokasi belanja modal Rp. 256. Koefisien bertanda negatif yang berarti apabila pendapatan asli daerah bertambah maka pengalokasian anggaran belanja modal pada provinsi juga akan berkurang.

4. Koefisien variabel dana alokasi umum sebesar - 0,222, artinya ketikadana alokasi umum meningkat 1 satuan dan variabel lain memiliki nilai 0 maka pengalokasian anggaran belanja modal akan meningkat sebesar 0,222. Angka tersebut dapat diasumsikan setiap peningkatan dana alokasi umum Rp. 1. 000 diprediksi akan meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modal Rp. 222. Koefisien bertanda negatif yang berarti apabila dana alokasi umum bertambah maka pengalokasian anggaran belanja modal akan berkurang.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

Uji regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji ini dalam penelitian ini yaitu uji T dan uji F.

##### 4. 3. 1 Uji Statistik T

Uji T digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji Statistik t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengukuran yang dipakai adalah dengan menggunakan perbandingan  $t_{tabel}$  dengan  $t_{hitung}$ . Untuk itu dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

$H_a$  : variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.

Jika  $t_{tabel} > t_{hitung}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak atau bila  $t_{tabel} < t_{hitung}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan derajat kepercayaan 5%  $t_{tabel}$  sebesar 1.987. Berikut adalah tabel hasil dari uji T:

Tabel. 4. 9  
Hasil Uji T  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.652	1.959		8.501	.000
LN_PE	.659	.118	1.139	5.586	.000
LN_PAD	-.256	.121	-.423	-2.106	.038
LN_DAU	-.222	.107	-.158	-2.087	.040

**a. Pengujian Hipotesis 1**

Hipotesis pertama yang diajukan ( $H_1$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal provinsi di Indonesia periode tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4. 9, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki  $t_{hitung} = 5,586$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{tabel} < t_{hitung} (1,987 < 5,586)$  dan nilai signifikansi variabel  $0,000 < 0,05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan ( $H_1$ ) diterima dan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasi anggaran belanja modal.

**b. Pengujian Hipotesis 2**

Hipotesis kedua yang diajukan ( $H_2$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal provinsi di Indonesia periode tahun 2010 -2012. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan dalam Tabel 4. 9, pendapatan asli daerah memiliki  $t_{hitung} = -2,106$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,038. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{tabel} < t_{hitung} (1,986 < -2,106)$  dan nilai signifikansi variabel  $0,038 < 0,05$ .



Sehingga hipotesis yang diajukan ( $H_2$ ) diterima dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengalokasi anggaran belanja modal.

**c. Pengujian Hipotesis 3**

Hipotesis ketiga yang diajukan ( $H_3$ ) pada penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal provinsi di Indonesia periode tahun 2010 - 2012. Berdasarkan hasil uji  $t$  yang disajikan dalam Tabel 4.9, dana alokasi umum memiliki  $t_{hitung} = -2,087$  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,040. Hal ini menunjukkan bahwa  $t_{tabel} < t_{hitung} (1,987 < -2,087)$  dan nilai signifikansi variabel  $0,040 < 0,05$ . Sehingga hipotesis yang diajukan ( $H_3$ ) diterima dan dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasi anggaran belanja modal.

**d. Pengujian Hipotesis 4**

Selain uji  $T$ , dalam analisis regresi berganda juga diperlukan sebuah pengujian untuk menguji variabel-variabel penelitian secara simultan atau bersama-sama. Selain itu uji  $F$  ini juga akan menguji hipotesis yang keempat. Hipotesa akan diterima apabila  $F_{tabel} > F_{hitung}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak atau bila  $F_{tabel} < F_{hitung}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat kesalahan 5% maka  $F_{tabel}$  sebesar 2,72. Berikut adalah tabel hasil uji  $F$ :

**Tabel. 4. 10**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.299	3	8.433	34.100	.000 <sup>a</sup>
	Residual					
	Total	47.062	91			

Berdasarkan tabel di atas maka disimpulkan dengan tingkat kesalahan 5%, semua variabel bebas secara simultan signifikan berpengaruh positif secara statistik pada pengalokasian anggaran belanja modal. Ini dapat dilihat dari nilai  $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}} (2,72 < 34.100)$  dan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  yang sebesar 0,05 atau 5%. Dengan demikian hipotesis  $H_4$  diterima. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

#### 4. 4. 2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel-variabel independen mampu memprediksi variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinan berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Berikut tabel hasil output dari uji koefisien determinasi.

Tabel. 4. 11  
Koefisien Determinasi  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 <sup>a</sup>	.538	.522	.49730

Sumber :SPSS 19, data diolah oleh peneliti 2014

Dari tabel 4.11 dapat terlihat hasil *adjusted R<sup>2</sup>* dari variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebesar 0,522. Hal ini berarti bahwa 52,2% dari pengalokasian anggaran belanja modal dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan 42,2% lainnya dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model regresi. Dalam hal ini faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini adalah sumber penerimaan lain yang berasal dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pemerataan pendapatan.

## 4.5 Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang

lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

*Agency Theory* menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual di antara agen dan prinsipal. Dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Ada beberapa faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku sekiranya sumber ekonomi yang tersedia ada tidak ditambah. Sumber ekonomi yang penting ialah modal, tanah, sumber manusia, sumber tenaga, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Lebih banyak sumber tersebut dapat diwujudkan dalam sesebuah sistem ekonomi, lebih banyaklah aktivitas pengeluaran dapat dijalankan. Aktivitas pengeluaran pula dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan baru dapat pula menambahkan kuasa beli di kalangan anggota sebuah masyarakat.

Peningkatan kuasa beli menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap barang, dengan ada barang dan permintaan yang selalu ada, ataupun barang dan permintaan baru, misalnya rekreasi.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Jadi Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun pengalokasian anggaran belanja modal.

#### **4. 5. 2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Pendapatan asli daerah menunjukkan hasil yang negatif signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna

Rizanda (2010) yang menyatakan PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan hasil negatif dari penelitian ini bahwa apabila pendapatan asli daerah bertambah maka pengalokasian anggaran belanja modal pada provinsi juga akan berkurang. Karena PAD lebih banyak digunakan untuk belanja operasional daripada untuk membiayai belanja modal di suatu provinsi. Hal didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo, yaitu adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai *trade off* karena sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang lain.

Jika dilihat dari laporan realisasi anggaran, pemerintah daerah mempunyai tiga kewajiban belanja yaitu, belanja operasional, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Karena terbatasnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah sementara beban belanja terus meningkat, pemerintah pusat memberikan sumber dana lain untuk dikelola oleh pemerintah daerah dari pendapatan APBN yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini membuat pemerintah untuk meningkatkan pembangunan berbagai fasilitas sektor publik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan demikian pengalokasian anggaran belanja modal akan mendapatkan anggaran yang meningkat.

Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan untuk pengalokasian anggaran belanja modal. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui pengalokasian anggaran belanja modal, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur atau sarana dan prasarana tersebut dibiayai dari pengalokasian anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Dengan demikian terdapat hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal)

diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah.

#### **4.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Berdasarkan uji statistik-t diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa Dana Alokasi umum secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil ini sejalan dengan Putro (2011) yang mengambil sample 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. .

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri



(PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi Hal ini mengindikasikan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik peneliti menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetri*. Sehingga diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal karena semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

#### **4.5.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Adanya kombinasi dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum akan meningkatkan porsi untuk pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini sesuai dengan  $H_4$ , sehingga  $H_4$  diterima. Hasil uji koefisien determinasi merupakan uji yang menjadi landasan diterimanya  $H_4$ .

Pada uji tersebut, hasil *adjusted*  $R^2$  yang menjadi tolak ukur pengaruh variabel independen secara simultan menunjukkan hasil 0,522. Hal ini mengandung makna bahwa sebanyak 52,2% variabel dependen dapat

dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, sedangkan 42,2% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dan tidak diteliti berdasarkan model regresi penelitian ini. Dalam hal ini faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini adalah sumber penerimaan lain yang berasal dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pemerataan pendapatan seperti dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, maka akan meningkat pula alokasi anggaran belanja modal suatu provinsi. Hal ini sangat menguntungkan bagi provinsi yang sedang berkembang, karena pertumbuhan ekonomi ini bisa dengan mudah tercapai apabila dari semua sektor pendapatan asli daerah meningkat pula. Pendapatan asli daerah akan sangat berguna untuk menambah anggaran belanja modal. Karena bila PAD menurun maka anggaran belanja modal pun akan berkurang. Suatu provinsi akan lebih kuat jika sektor PAD berkontribusi dengan sangat baik dan didukung oleh DAU yang digunakan dengan sangat cermat dalam mendukung pembangunan daerah.

Hal itu sangat penting karena pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU sangat berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Semakin bijak menggunakan DAU, meningkatnya pemasukan dari PAD dan pertumbuhan ekonomi yang positif maka alokasi anggaran belanja modal akan mudah

untuk di gunakan dalam proses pembangunan daerah dan pemasukan bagi pemerintah pusat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Periode penelitian dalam penelitian ini yaitu 2010 dan 2012 dengan sampel penelitian yaitu laporan realisasi pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah daerah 2010 dan 2012 adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah daerah periode 2010 dan 2012.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan  $t_{hitung} = -3,186$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah sementara beban untuk belanja lainnya semakin meningkat membuat pemerintah harus memprioritaskan belanja operasional dibandingkan belanja modal. Hal ini yang mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak menjadi salah satu faktor yang penentu untuk alokasi belanja modal.

3. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan  $t_{hitung} = 6,196$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini dapat dijelaskan karena meningkatnya tambahan pembiayaan aset dari pertumbuhan ekonomi dapat mempermudah pengalokasian anggaran pemerintah daerah yang mana akan meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modal.
4. Dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan  $t_{hitung} = 0,654$  dan tingkat signifikansi sebesar 0,516. Masing-masing daerah memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan tata ruang yang dapat dimanfaatkan untuk investasi. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa daerah yang memiliki dana alokasi umum yang besar belum tentu memaksimalkan potensi pembangunan di provinsinya sehingga dana alokasi umum bukan merupakan penentu dari anggaran untuk pengalokasian anggaran belanja modal.
5. Variable independen yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mampu menjelaskan variabel dependen yaitu belanja modal sebesar 55,0%. Sedangkan sisanya sebesar 85,6% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Sampel yang tersedia hanya 22 pemerintah daerah provinsi dari 33 provinsi. Penelitian ini hanya dapat berfokus pada provinsi yang memiliki

anggaran dalam suatu provinsi, sehingga tidak mencakup seluruh populasi di Indonesia.

2. Rentang waktu data yang digunakan hanya tiga tahun, mungkin hasilnya akan lebih baik apabila data yang digunakan adalah data yang mempunyai rentang waktu yang lebih lama.

### **5.3 Saran Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

- a. Bagi peneliti berikutnya:
  1. Koefisien determinasi sebesar 55,0% menunjukkan masih terdapat banyak faktor lain yang mampu mempengaruhi besarnya pengalokasian anggaran belanja modal pemerintah daerah. faktor lain yang bisa dimasukkan dalam penelitian ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerataan pendapatan provinsi di Indonesia.
  2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variable lain dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dan tidak berfokus pada variable pertumbuhan ekonomi.
- b. Bagi Pemerintah:

Diharapkan pemerintah memperhatikan alokasi untuk belanja modal yang mana akan memberikan manfaat untuk meningkatkan taraf perekonomian dari provinsi itu sendiri sehingga dapat memajukan perekonomian pada provinsi. Selain itu diharapkan pemerintah pusat merealisasikan batas maksimal untuk belanja modal dan batas minimum untuk belanja pegawai

sehingga tidak terjadi perbedaan yang sangat besar untuk belanja modal antara provinsi yang satu dengan lainnya.



## Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah” *Simposium Nasional Akuntansi VI*, hal. 1140-1159.
- Badan Pusat Statistik Seluruh Indonesia, 2012, [www.indonesia.bps.go.id](http://www.indonesia.bps.go.id)
- Bastian, Indra, 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Buku Satu*, Salemba Empat, Jakarta.
- Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal : Studi Kasus Kabupaten/ Kota Jawa dan Bali”, *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26-28 Juli 2007.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi APBD, 2013, [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resources Allocation in The Publik Sector and Their Implication for Pro-Poor Budgeting. Center For Aid and Public Expenditure, Overseas Development Intitute . *Working paper*, 147
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS.*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012. *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang Universitas Diponogoro.
- Keefer, Philip & Stuti Khaemani, 2003. The political Economy of Public Expenditure. *Background Paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta : Erlangga.
- Legenzi, Gabriella& Costas Millas. 2001. *Non-Linear and Asymetric Adjustment the Local Revenue- ExpenditureModels: Some Evidance From The Italian Municipalites*. University of Milan, Working Paper
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Nachrowi, D Nachrowi, & Usman, Hardius. 2006. *Pendekatan populer dan praktis ekonomika untuk analisis ekonomi dan keuangan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Putro, 2008. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Study Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah..*
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Pelayanan Publik*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis. Dilengkapi Dengan Metode R&D . Edisi Revisi*. Bandung
- Syaiful, 2006. *Pengertaian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Akuntansi Pemerintahan*.
- Umar, Husein, 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Publik Budgeting, Accounting and Financial Management*.

Lampiran 1

Data Realisasi APBD Tahun 2010

Uraian	Prov. Aceh	Prov. Sumatera Utara	Prov. Sumatera Barat	Prov. Riau
	1	2	3	4
<b>PAD</b>	796.949	2.554.780	1.006.821	1.700.951
Pajak daerah	521.326	2.271.475	768.724	1.414.191
Retribusi daerah	7.493	35.813	28.265	42.750
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	98.845	166.320	46.814	85.662
Lain-lain PAD yang sah	169.284	81.172	163.018	158.347
<b>Dana alokasi umum</b>	621.075	812.748	662.403	58.869
<b>Belanja Modal</b>	3.267.911	716.934	583.068	1.238.747
Tanah	295.499	19.891	7.934	28.358
Peralatan dan Mesin	349.909	187.995	60.444	127.398
Gedung dan Bangunan	1.204.688	121.421	147.650	418.194
Jalan, irigasi dan jaringan	1.399.969	378.745	363.021	652.723
Aset tetap lainnya	17.846	8.882	4.018	6.449
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	5.624

Prov. Jambi	Prov. Sumatera Selatan	Prov. Bengkulu	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Tengah	Prov. DI Yogyakarta	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Jawa Timur
5	6	7	8	9	10	11	12
686.629	1.369.936	351.091	7.252.243	4.785.133	740.202	777.243	7.275.089
602.355	1.226.713	259.804	6.470.866	3.893.700	634.710	620.609	5.907.320
43.610	17.747	59.611	32.249	127.651	32.837	78.579	66.238
12.444	62.606	10.895	226.366	195.632	26.334	35.202	243.827
28.221	62.870	20.782	522.762	568.150	46.322	42.853	1.057.705
488.743	512.084	523.041	1.086.124	1.168.788	527.471	755.123	1.212.935
465.860	1.032.890	165.062	1.055.537	419.476	123.425	376.897	877.877
1.520	37.334	1.614	282.923	13.684	-	21.884	8.342
65.695	135.921	42.834	120.297	139.064	-	61.427	250.838
103.774	182.423	41.148	75.472	96.294	-	68.801	426.309
286.488	655.815	72.309	567.866	167.867	-	220.518	183.788
8.384	102	7.157	8.893	2.567	-	376.897	7.583
-	-	-	-	-	-	-	-
-	21.294	-	85	-	123.425	461	1.017

Prov. Kalimantan Tengah	Prov. Kalimantan Selatan	Prov. Sulawesi Utara	Prov. Sulawesi Tengah	Prov. Sulawesi Selatan	Prov. Sulawesi Tenggara	Prov. Bali	Prov. Nusa Tenggara Barat
13	14	15	16	17	18	19	20
504.217	1.286.259	418.738	411.797	1.545.590	339.361	1.393.730	515.341
416.519	1.088.346	373.765	344.355	1.334.804	202.930	1.221.182	391.690
25.282	41.660	11.934	29.650	108.561	51.036	20.940	54.901
17.304	8.389	13.554	11.384	51.552	14.104	60.788	40.937
45.112	147.863	19.485	26.408	50.673	71.291	90.820	27.812
707.880	458.075	558.781	659.331	706.276	595.762	489.943	573.065
541.293	677.301	164.360	203.792	303.648	235.364	201.468	144.557
-	15.519	4.771	533	8.287	7.445	19.925	-
79.089	176.947	35.034	47.264	85.716	27.388	58.325	32.858
97.390	265.782	26.006	36.948	16.955	40.669	30.261	35.088
341.491	167.008	95.534	115.957	184.470	159.485	76.745	74.193
23.322	52.044	3.016	3.090	6.181	376	16.212	2.419
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.039	-	-	-

Prov. Nusa Tenggara Timur	Prov. Maluku	Prov. Papua	Prov. Maluku Utara	Prov. Banten	Prov. Bangka Belitung	Prov. Lampung	Prov. Gorontalo	Prov. Kepulauan Riau
21	22	23	24	25	26	27	28	29
298.154	169.569	380.026	77.843	2.321.749	328.122	1.111.209	133.125	521.054
195.008	116.397	252.435	61.999	2.208.083	296.215	951.316	120.748	493.750
47.974	25.304	21.172	10.542	3.196	2.628	7.082	-	1.523
19.826	17.061	30.341	76	37.874	3.077	12.823	-	-
35.347	10.807	76.078	5.225	72.595	26.202	139.988	12.376	25.781
674.636	607.572	1.148.498	479.727	381.979	410.642	643.376	400.751	310.162
176.559		1.404.550	192.525	826.563	313.362	425.809	108.996	657.184
-	728	11.010		151.572	23.802	1.139	18.400	9.248
23.058	38.358	187.559		197.165	14.435	87.966	15.973	91.828
28.445	46.410	261.532		215.142	146.503	77.718	19.677	261.229
123.183	69.594	851.726		248.513	128.493	254.459	54.198	292.136
1.873	3.771	92.723		12.213	129	4.528	748	2.744
-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	-		1.958	-	-	-	-

Prov. Sulawesi Barat	Prov. Papua Barat
30	31
90.208	125.853
78.353	99.848
1.908	1.091
	1.097
3	
9.944	23.818
405.750	605.786
205.064	995.882
	27.764
	159.366
	374.330
	402.419
	31.006
	-
	997



Lampiran 2

**Data Realisasi APBD tahun 2011**

Uraian	Prov. Aceh	Prov. Sumatera Utara	Prov. Sumatera Barat	Prov. Riau	Prov. Jambi
	1	2	3	4	5
<b>PAD</b>	<b>802.840</b>	<b>3.578.462</b>	<b>1.224.415</b>	<b>2.210.131</b>	<b>984.233</b>
Pajak daerah	586.181	3.141.124	983.602	1.773.622	838.852
Retribusi daerah	9.416	31.298	41.698	8.491	10.195
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	66.007	289.250	80.453	131.607	21.703
Lain-lain PAD yang sah	141.236	116.791	118.660	296.410	113.483
<b>Dana alokasi umum</b>	<b>716.646</b>	<b>948.868</b>	<b>764.681</b>	<b>380.051</b>	<b>583.882</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>1.473.983</b>	<b>1.063.237</b>	<b>525.003</b>	<b>1.342.180</b>	<b>518.751</b>
Tanah	167.157	7.784	5.195	50.556	2.883
Peralatan dan Mesin	243.550	285.919	64.234	81.727	108.471
Gedung dan Bangunan	609.121	156.277	154.991	608.776	96.496
Jalan, irigasi dan jaringan	444.854	562.856	298.400	548.912	309.553
Aset tetap lainnya	9.301	50.401	2.183	46.077	1.348
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	6.133	-

Prov. Sumatera Selatan	Prov. Bengkulu	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Tengah	Prov. DI Yogyakarta	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Jawa Timur	Prov. Kalimantan Tengah	Prov. Kalimantan Selatan
6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.849.120</b>	<b>440.920</b>	<b>8.502.567</b>	<b>5.564.233</b>	<b>867.113</b>	<b>1.080.422</b>	<b>8.898.617</b>	<b>815.245</b>	<b>1.868.595</b>
1.671.519	333.096		4.599.047	735.226	901.500	7.298.242	707.445	1.643.513
11.683	6.591		64.549	35.986	84.660	66.360	6.494	41.135
78.957	12.488		211.976	28.961	40.348	365.149	19.942	54
86.962	88.745		688.661	66.940	53.913	1.168.866	81.364	183.893
<b>646.813</b>	<b>607.388</b>	<b>1.181.553</b>	<b>1.276.180</b>	<b>620.812</b>	<b>395.746</b>	<b>1.347.502</b>	<b>795.816</b>	<b>504.876</b>
<b>1.139.120</b>	<b>220.890</b>	<b>718.651</b>	<b>464.327</b>	<b>142.794</b>	<b>419.084</b>	<b>1.045.362</b>	<b>432.340</b>	<b>596.845</b>
76.248			13.301	16.950		30.823	1.622	
153.713			151.337	21.453		330.884	77.120	
292.571			111.989	51.371		278.917	258.493	
615.704			184.567	45.164		368.018	88.726	
884			3.132	1.245		3.245	6.378	
-			-	-		-	-	
-			-	6.611		33.475	-	

Prov. Sulawesi Utara	Prov. Sulawesi Tengah	Prov. Sulawesi Selatan	Prov. Sulawesi Tenggara	Prov. Bali	Prov. Nusa Tenggara Barat	Prov. Nusa Tenggara Timur	Prov. Maluku	Prov. Papua	Prov. Maluku Utara
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>535.088</b>	<b>519.974</b>	<b>1.959.516</b>	<b>346.170</b>	<b>1.723.618</b>	<b>741.291</b>	<b>391.829</b>	<b>221.882</b>	<b>6.227.545</b>	<b>84.812</b>
477.202	421.222	1.729.076	262.509	1.496.934	506.910	266.729	164.846	<b>363.101</b>	76.654
8.866	14.059	111.625	18.544	33.541	59.557	10.446	25.426	275.092	3.921
23.107	17.796	62.367	13.488	70.314	135.639	33.863	17.191	18.889	66
25.912	66.898	56.448	51.629	122.828	39.185	80.790	14.420	19.888	4.171
<b>619.711</b>	<b>743.162</b>	<b>816.758</b>	<b>700.837</b>	<b>560.674</b>	<b>646.671</b>	<b>752.057</b>	<b>703.994</b>	<b>49.232</b>	<b>540.390</b>
<b>233.630</b>	<b>208.497</b>	<b>467.685</b>	<b>341.498</b>	<b>227.120</b>	<b>450.064</b>	<b>195.336</b>	<b>254.939</b>	<b>1.421.658</b>	<b>188.067</b>
6.822		5.237	5.380	4.168	8.229	10	1.034	19.552	3.231
67.162		82.432	55.797	77.198	29.324	32.294	73.700	244.432	34.388
38.917		36.795	188.728	44.829	122.002	16.413	81.570	326.245	52.402
116.189		340.746	91.467	100.004	285.909	145.478	95.743	797.825	93.152
4.540		715	126	921	4.470	1.141	2.893	33.604	4.559
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		1.760	-	-	129	-	-	-	335

Prov. Banten	Prov. Bangka Belitung	Prov. Lampung	Prov. Gorontalo	Prov. Kepulauan Riau	Prov. Sulawesi Barat	Prov. Papua Barat
25	26	27	28	29	30	31
<b>2.895.570</b>	<b>459.208</b>	<b>1.395.676</b>	<b>158.083</b>	<b>620.901</b>	<b>114.311</b>	<b>152.164</b>
2.769.882	418.390	1.199.946	144.752	572.739	96.383	119.510
3.780	3.566	8.689	-	1.656	2.042	1.138
31.533	4.016	19.399	-	-	25	4.961
90.374	33.236	167.642	13.331	46.507	15.860	26.555
<b>460.384</b>	<b>481.590</b>	<b>769.973</b>	<b>461.118</b>	<b>395.746</b>	<b>441.579</b>	<b>700.445</b>
<b>717.409</b>	<b>487.557</b>	<b>631.250</b>	<b>147.208</b>	<b>259.908</b>	<b>230.692</b>	<b>606.120</b>
178.683	12.457		14.366	2.669		20.795
85.569	129.434		23.435	83.734		151.942
145.435	88.738		20.091	48.085		163.643
306.679	256.790		88.876	123.769		246.163
756	138		441	1.651		23.577
-	-		-	-		-
287	-		-	-		-

Lampiran 3

Data Realisasi APBD Tahun 2012

Uraian	Prov. Aceh	Prov. Sumatera Utara	Prov. Jambi	Prov. Sumatera Selatan	Prov. DKI Jakarta	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Tengah
	1	2	5	6	8	9	10
<b>PAD</b>	901.720	4.050.760	995.202	2.001.710	22.040.800	9.982.920	6.629.310
Pajak daerah	687.477	3.636.070	808.259	1.803.820	17.721.500	9.149.210	5.590.600
Retribusi daerah	6.318	33.487	13.405	13.333	1.820.440	57.326	68.250
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	96.317	263.935	29.985	85.893	351.823	232.647	238.232
Lain-lain PAD yang sah	111.608	117.269	143.554	98.670	2.147.050	543.729	732.229
<b>Dana alokasi umum</b>	911.081	1.103.390	731.952	716.153	275.328	1.269.960	1.516.890
<b>Belanja Modal</b>	815.339	803.608	682.820	1.017.180	8.784.370	1.135.250	611.274
Tanah	62.450	21.998	2.991	77.799	493.715	135.526	24.917
Peralatan dan Mesin	122.042	134.043	106.032	121.511	3.262.970	205.953	149.618
Gedung dan Bangunan	256.554	107.964	100.128	174.234	2.527.760	252.687	128.130
Jalan, irigasi dan jaringan	368.600	537.370	470.041	641.402	1.961.670	535.108	306.136
Aset tetap lainnya	5.693	2.233	3.522	659	538.248	4.348	2.473
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	1.576	-	-	-
Aset lainnya	-	-	106	-	-	1.629	-

Prov. DI Yogyakarta	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Jawa Timur	Prov. Kalimantan Tengah	Prov. Kalimantan Selatan	Prov. Kalimantan Timur	Prov. Sulawesi Utara	Prov. Sulawesi Tengah	Prov. Sulawesi Selatan	Prov. Sulawesi Tenggara	Prov. Bali
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.004.060	1.164.430	9.584.080	959.205	2.476.160	5.409.450	633.651	605.821	2.198.780	439.184	2.042.090
871.631	986.813	7.816.590	836.504	2.199.590	4.486.400	554.846	494.753	1.949.190	336.933	1.813.340
34.115	89.055	118.824	6.963	9.275	22.496	14.790	3.124	113.059	19.161	50.546
35.493	47.620	352.900	22.159	63	207.794	24.434	5.475	67.557	25.047	76.702
62.825	40.937	1.295.770	93.579	267.227	692.755	39.580	102.470	68.966	58.045	101.502
757.057	1.023.230	1.491.560	951.256	652.535	52.638	790.534	902.088	996.940	869.883	694.079
216.420		1.057.370	635.814	805.698	2.499.130	350.597	324.862	377.152	204.203	343.634
29.675		30.662	71	28.986	78.086	76.343	549	1.285	5.178	-
55.984		343.215	102.528	80.199	199.186	84.470	65.998	70.567	21.247	118.993
76.882		232.471	140.831	384.789	657.061	45.780	56.460	25.288	69.032	64.082
51.869		423.623	376.103	300.219	1.561.500	139.959	193.246	276.989	107.455	159.136
1.543		4.333	16.214	11.504	3.303	4.045	8.609	827	1.290	1.423
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
466		23.061	67	-	-	-	-	2.196	-	-

Prov. Nusa Tenggara Barat	Prov. Nusa Tenggara Timur	Prov. Papua	Prov. Maluku Utara	Prov. Banten	Prov. Bangka Belitung	Prov. Lampung	Prov. Gorontalo	Prov. Kepulauan Riau	Prov. Sulawesi Barat	Prov. Papua Barat
22	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33
745.980	458.794	623.163	115.905	3.395.880	438.515	1.666.720	180.039	723.054	140.397	175.450
580.616	315.288	401.692	91.735	3.257.730	396.527	1.465.710	168.069	685.602	119.940	142.529
10.129	9.850	15.773	7.202	6.419	3.689	8.210	88	5.352	1.422	1.421
53.822	42.740	22.599	73	32.294	7.193	287	-	-	-	8.810
101.413	90.915	183.098	16.895	99.442	31.106	192.510	11.882	32.100	19.035	22.690
809.618	940.647	1.569.780	703.159	530.833	634.088	939.139	582.140	460.858	590.680	901.398
404.993	244.750	1.309.180	418.588	917.699	290.810	831.951		262.340		853.869
-	25	18.300	10.208	16.997	66.672	143.248		24		27.403
43.160	47.311	164.535	56.290	273.316	28.345	96.884		73.733		144.561
85.064	47.106	466.058	133.004	105.481	34.387	103.423		18.980		282.414
275.319	149.281	627.801	208.936	509.164	157.905	487.324		168.794		395.152
265	1.027	32.484	10.150	11.937	3.501	1.072		809		4.338
-	-	-	-	-	-	-		-		-
1.186	-	-	-	804	-	-		-		-

Sektor Ekonomi	Provinsi Aceh			Provinsi Sumatra Utara			Provinsi Kepulauan Riau	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pertanian	22,11	24,04	25,99	62 984,34	70 655,87	76 838,11	3434219,69	3712921,64
2. Pertambangan dan Penggalian	8,75	10,21	10,71	3 759,75	4 341,19	4 635,32	5936974,33	6125134,25
3. Industri Pengolahan	7,63	7,87	8,36	63 013,45	70 672,27	77 484,96	33488733,74	38343836,2
4. Listrik dan Air Bersih	0,34	0,4	0,45	2 602,69	2 966,49	3 178,78	403727,54	477708,32
5. Bangunan	8,08	9,56	10,75	17 519,79	20 172,80	23 595,94	5275841,96	6252046,67
6. Perdagangan, Hotel dan restoran	12,48	14,44	16,18	52 395,32	60 387,52	67 027,28	14180068,31	15568076,09
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,26	9,37	10,76	24 907,45	28 964,29	32 854,36	3243134,49	3602226,78
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa perusahaan	2,05	2,25	2,74	18 163,84	21 887,63	26 442,21	3717777,14	4001087,58
9. Jasa-jasa	9,46	9,85	10,22	29 709,88	34 324,37	39 061,18	1934037,11	2159756,1
<b>PDRB</b>	<b>79,15</b>	<b>87,99</b>	<b>96,16</b>	<b>275 056,51</b>	<b>314 372,44</b>	<b>351 118,16</b>	<b>71614514,31</b>	<b>80242793,63</b>



	Provinsi Lampung			Provinsi Kalimantan Selatan			Provinsi Jawa Tengah	
2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011
10	11	12	13	14	15	16	17	18
4040361,49	39917414	45478685	51927562	12446620,56	13696206,72	14603477,7	86665684,94	95078348,99
6776185,35	2161754	2672150	2840577	14107440,94	16659913,71	18008900,4	4302563,07	4726493,18
43909909,58	17120714	20555157	22481435	5611080,15	6270582,19	6865260,06	146132837,6	165850520,2
538551,82	595503	691203	788597	346672,96	390928,55	435473,9	4645499,82	5110058,36
7260636,24	3968970	397009	4855562	3569931,02	3994602,18	4553773,15	27124582,63	29851905,75
18179719,92	16530762	20481520	22930103	8999094,25	10447231,32	12394973,3	86996495,32	98462085,4
4077682,91	11011468	14716358	16676487	5319610,68	5993779,78	6697260,05	26298747,14	29172039,07
4491553,42	6844990	7633617	8892445	3023569,36	3438297,87	3923864,4	15899731,16	17684047,74
2442072,35	10252964	11282562	13168600	6399046,02	7295337,4	8440149,69	46599867,32	53828325,46
<b>91716673,08</b>	<b>108404539</b>	<b>123908261</b>	<b>144561368</b>	<b>59823065,94</b>	<b>68186879,72</b>	<b>75923132,6</b>	<b>444666009</b>	<b>498763824,2</b>

ah	Provinsi Bengkulu			Provinsi Banten			Provinsi Jawa Barat		
2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
104311416,8	7441060,18	8453079,53	9410185,34	14210,4	15275,57	16727,55	97194393,11	103131444,1	109094870,7
5239594,32	774016,46	887689,77	1015005,53	183,94	202,15	228,06	15546258,98	17362819,18	17581175,11
182715245,1	785713,13	922958,78	1072203,74	83123,18	91675,16	97799,41	291688079,9	319983632,5	338881029,6
5648692	100013,56	111040,3	130824,22	6097,95	6975,86	8142,22	21294460,28	21943284,72	23746247,01
33352512,04	678,265,13	776243,47	914179,61	5974,71	6852,95	7913,62	29047786,13	34358935,39	40600002,59
112,908719,28	3540326,42	4010528,73	4563944,85	31312,66	35563,25	40957,99	172173170	194431786,1	226258610,1
32951087,21	1493049,12	1732820,74	1971207,87	15173,54	17638,078	20150,7	54635684,27	66336491,01	73802069,55
19993405,95	833785,45	1029125,9	1191611,07	6557,64	7361,394	8301,12	21155314,87	24479915,55	27913244,87
59359199,44	2953887,18	334710,39	3904109,98	9113,58	10836,88	12977,12	68318685,97	78953683,59	88983521.25
556479872,1	18600116,7	21269197,6	24173272,22	171747,6	192381,292	213197,79	771053833,5	860981992,2	94860770,81

Provinsi Yogyakarta			Provinsi Sulawesi Utara			Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Nusa Tenggara	
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	29
6644695	7373852	8355326	6825538,9	7298876	7820139,2	30442430,26	34788232,48	39616821,35	10657816,1	11545882,7
304660	361793	379951	1516646	1671343,5	1772981,87	7119680,36	8345805,89	8961891,28	382545,48	424823,8
6396639	7434020	7611825	3062196,7	3285811,4	3564218,31	14457258,62	16789287,78	19408060,74	427448,14	471728,22
607072	675912	727714	291276,77	316006,94	360309,41	1087972,08	1245911,79	1439212,7	116169,06	136945,55
4833423	5580599	6186322	6055085,9	7253791,8	8162329,56	6534511,55	7760900,52	9071236,24	1931451,62	2182737,32
9008181	10246578	11457201	6313059,3	7552896,1	8304826,9	20434953,2	24241346,66	28748163,65	4654428,57	5388755,98
4119970	4572928	4903522	4268112,1	4739331,9	5679001,63	9445566,86	10849773,13	12982854,59	1601144,81	1771440,78
4552667	5158229	5876203	2358864,5	2607687,3	3017839,77	7810114,22	9513693,76	11803265,52	1133510,02	1322613,46
9158283	10381238	11536320	6118218,3	7105708,8	8516656,88	20529723,04	23984819,93	30850530,41	6841818,42	7976600,43
<b>45625590</b>	<b>51785149</b>	<b>57034383</b>	<b>36808998</b>	<b>41831454</b>	<b>47198303,5</b>	<b>117862210,2</b>	<b>137519771,9</b>	<b>162882036,5</b>	<b>27746332,2</b>	<b>31221528,2</b>

a Timur	Provinsi Nusa Tenggara Barat			Provinsi Kalimantan Barat			Provinsi Gorontalo			Provinsi P
2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
12677148,1	10.038.756	11.354.297	12.725.514	15.167,00	16.812,80	18.077,90	80934,13	87911,62	929919,15	4665165,14
483522,92	18.066.479	12.927.229	9.228.512	1.205,60	1.355,40	1.497,60	15039,04	14595.82	15161,17	2302782,91
528339,82	1.638.225	1.758.209	1.936.295	11.138,10	12.005,20	12.772,00	107426.24	114713,65	126642,31	11970841,3
149809,13	205.175	3.637.140	252.860	315,1	332,1	354,4	32390,25	35585,16	42250,02	97557
2538667,27	3.199.220	3.637.140	4.092.610	5.586,80	6.651,00	8.093,50	143294,21	188884,5	221368,61	2034290,84
6237887,62	6.258.742	7.208.769	8.302.153	13.766,00	15.074,20	17.040,90	314652,92	371374,02	468049,57	1888243,87
2003808,03	3.269.754	3.563.60	3.808.385	4.437,30	4.946,90	5.500,00	230386,25	255280,45	296328,35	1429837,86
1507769,41	2.159.718	2.462.418	2.873.319	2.907,50	3.253,10	3.622,20	207881,08	242366,32	282260,61	556889,28
9126407,85	4.795.579	5.685.656	6.309.732	6.018,20	6.482,90	8.068,60	462893,21	527416,02	590702,42	1927478,33
35253360,2	49.631.648	48.670.858	49.529.380	60.541,60	66.913,50	75.027,30	1487471,1	1823531,74	2972682,2	26873086,53

Papua Barat		Provinsi Sulawesi Selatan			Provinsi Sulawesi Tengah			Provinsi Bangka Belitung	
2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011
51	52	53	54	55	56	57	58	56	57
4976708,57	5198159,91	305442430,3	34788232,48	39616821,35	14 507 237	16 493 715	18 376 221	4977930	5517313
2615421,89	2771274,6	7119680,36	8345805,89	8961891,28	1 939 569	2 767874	3 651 529	4687362	5126885
18689731,89	23087926,25	14457258,62	16789287,78	19408060,74	2 812 821	3 084 443	3 363 839	5649560	6261789
110622,75	126780,66	1087972,08	1245911,79	1438212,7	240 940	285 567	335 488	171600	209940
2483291,41	3135426,02	6534511,55	7760900,52	9071236,24	2 478 308	3 205 542	4 052 197	1917917	2343565
2349080,27	2825521,88	20434953,2	24241346,66	28748143,65	4 437 424	5 301 431	6 194 460	4935464	5814054
1699658,44	1993707,88	9445566,86	10849773,13	12982894,59	2 642 818	3 146 576	3 606 293	847990	100738
669801,93	813989,53	7810114,22	9513693,76	11803265,52	1 773 462	2 143 731	2 419 468	663714	789214
2584463	2807151,51	20529723,04	23984818,93	27828385,32	6 481 787	7 883 343	9 062 578	2861435	3420451
<b>36178780,15</b>	<b>42759938,24</b>	<b>117862210,2</b>	<b>137519770,9</b>	<b>159858911,4</b>	<b>37 314 367</b>	<b>44 312 222</b>	<b>51 062 074</b>	<b>26712971</b>	<b>301483949</b>

itung	Provinsi Jawa Timur			Provinsi Bali			Provinsi Jaml	
2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011
58	56	57	58	56	57	58	56	57
6423499	12262396768	13602791933	15445945507	1209870321	1273716829	14136970858	15846493	18583306
5399472	17703074277	1979405902	2080312763	47115160	54496010	66001001	9824932	12067110
6718413	21402472937	23984452036	27159595673	615181464	660630198	747092925	5981287	6747658
243419	1176711244	1269073303	1355493468	126330888	142961141	170388859	484976	587747
2842950	3499397971	4129564914	4555108091	303398671	344042358	435142623	2446569	2708468
6577529	22940487155	26523885962	30449811405	2019629372	2270206311	2537303968	7827668	9476118
185691	4294775898	5003132010	5708999132	968328891	1068861278	1229919124	3518812	4024682
953339	3816517351	4394341034	5055839667	461931633	502388697	566339283	2783618	3225703
4114376	6760590767	7563617435	8369082240	967637315	1085677153	1228448403	5138814	5900240
34458590	77856424369	88450264560	100172087947	6713423715	7402979976	8394333271	53857689	63355314

bi	Provinsi Sulawesi Tenggara			Provinsi Sumatera Selatan			Provinsi Papua		
2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
58	56	57	58	56	57	58	56	57	58
21675418	941917811	1023458369	1117058733	27664815	31387655	34201044	813453877	896315242	993267182
12626675	139127325	194831632	283845044	34225600	41016385	43983200	5648433474	4024904745	3617461129
792521	202602400	221758613	232679803	34730927	37479687	41519427	123917775	138992048	148904356
669265	26255668	29635749	35994312	765449	871229	100653	11991733	12943469	14153192
3492642	234416911	274210502	321692492	10911312	14016599	16628373	635919705	810424608	952825807
11459738	514182051	596372597	698543572	20391259	23744794	28126875	394333886	453879328	528045584
4621533	263652242	295007547	328784976	7285632	8613596	10267995	389062983	439779973	503249993
3748432	156922933	190573097	218399237	5682013	6563000	7647992	185856353	209298320	233901526
2436940	358576695	385455623	423076401	16078035	18697547	22955328	570371926	663596375	747800401
<b>72654165</b>	<b>2837658036</b>	<b>3211303729</b>	<b>3660074570</b>	<b>157735042</b>	<b>182390492</b>	<b>206330887</b>	<b>8773341707</b>	<b>7650134108</b>	<b>7739609170</b>

Provinsi Kalimantan Tengah			Provinsi Riau			Provinsi Sumatera Barat		
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
56	57	58	56	57	58	56	57	58
1213815	1391789	1560704	6909207971	7808166451	8534044390	2088536767	2342153852	2546986533
382105	469142	555754	12611228718	15495473078	16683518662	276385608	293913930	318749990
334093	363707	390243	7030930089	8008627021	9008862056	1019776828	1126763387	1227859876
27104	33180	38240	58454611	72680074	83752688	92462375	96574973	104334284
236904	270884	308959	1926290524	2575236141	3322861248	549560553	651553977	741967746
886715	1025079	1186426	3228035484	4062937300	5136513312	1547482276	1784397940	2037731399
381852	402916	457987	671979107	782880211	937472089	1341702357	1544537325	1738764797
246209	288551	339234	841737403	1046836660	1318318095	413524412	447525428	495926794
548313	659505	751012	1299517473	1553775344	1881959756	1393230487	1609278343	1805643924
<b>4257111</b>	<b>4904754</b>	<b>5588558</b>	<b>34577381379</b>	<b>41370612280</b>	<b>46907302296</b>	<b>8722661664</b>	<b>9896699156</b>	<b>11017965342</b>



Provinsi Sulawesi Barat			Provinsi Maluku Utara			Provinsi Maluku		
2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
56	57	58	56	57	58	56	57	58
546973	625466	683421	195917	216378	241507	2565	2860	3283
9563	13382	12799	27788	30253	32140	59	74	88
79639	97858	103925	70325	77081	86507	364	425	520
4619	5530	6562	3105	3423	3848	48	52	58
45304	52417	59142	15913	19065	23213	153	187	222
142966	167198	188119	126366	146576	176917	2339	2714	3292
23398	27191	29126	42179	46330	52953	755	981	1148
66908	74175	80185	20371	23266	26331	362	405	459
179145	227179	277486	37019	41495	48420	1440	1901	2400
<b>1098515</b>	<b>1288396</b>	<b>1440764</b>	<b>538983</b>	<b>603867</b>	<b>691836</b>	<b>8085</b>	<b>9599</b>	<b>11470</b>

## Lampiran 5

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	93	108,996.10610	3,267,911.38700	580,952.09952	478,918.60543
PDRB	93	5.39000	1,001.72100	150.24906	223.81875
PAD	93	77,842.74279	9,982,920.00000	1,696,050.47236	2,243,409.45434
DAU	93	49,231.90805	1,569,780.00000	719,526.89707	286,920.94591
Valid N (listwise)	93				

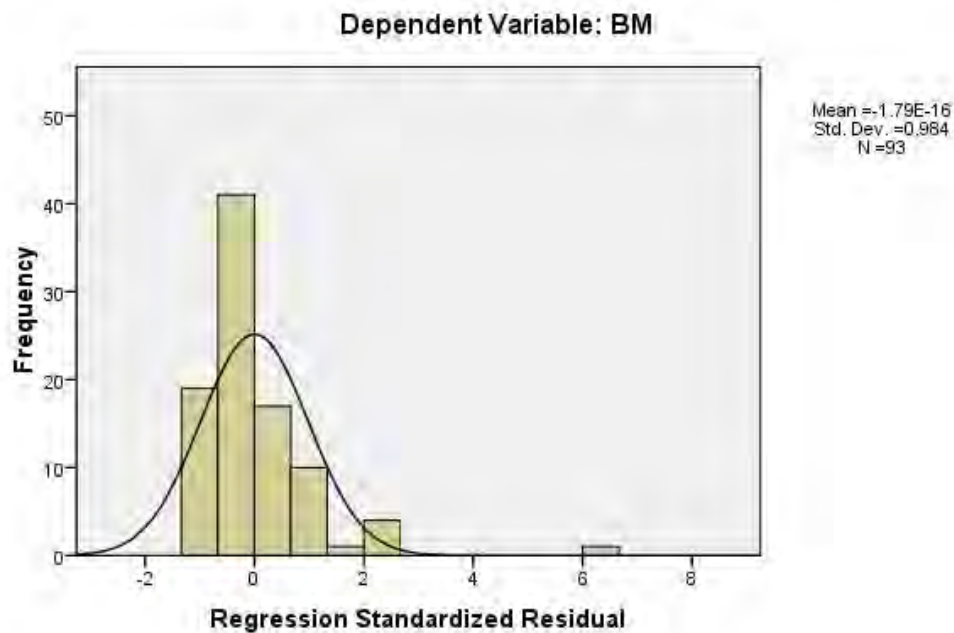
## Lampiran 6

### CasewiseDiagnostics<sup>a</sup>

Case Number	Std. Residual	LN_Y	Predicted Value	Residual
— 1	3.520	15.00	13.1213	1.87840

## Lampiran 7

### Histogram



## Lampiran 8

### Hasil Uji Normal dengan *Skewness* *Kurtosis*

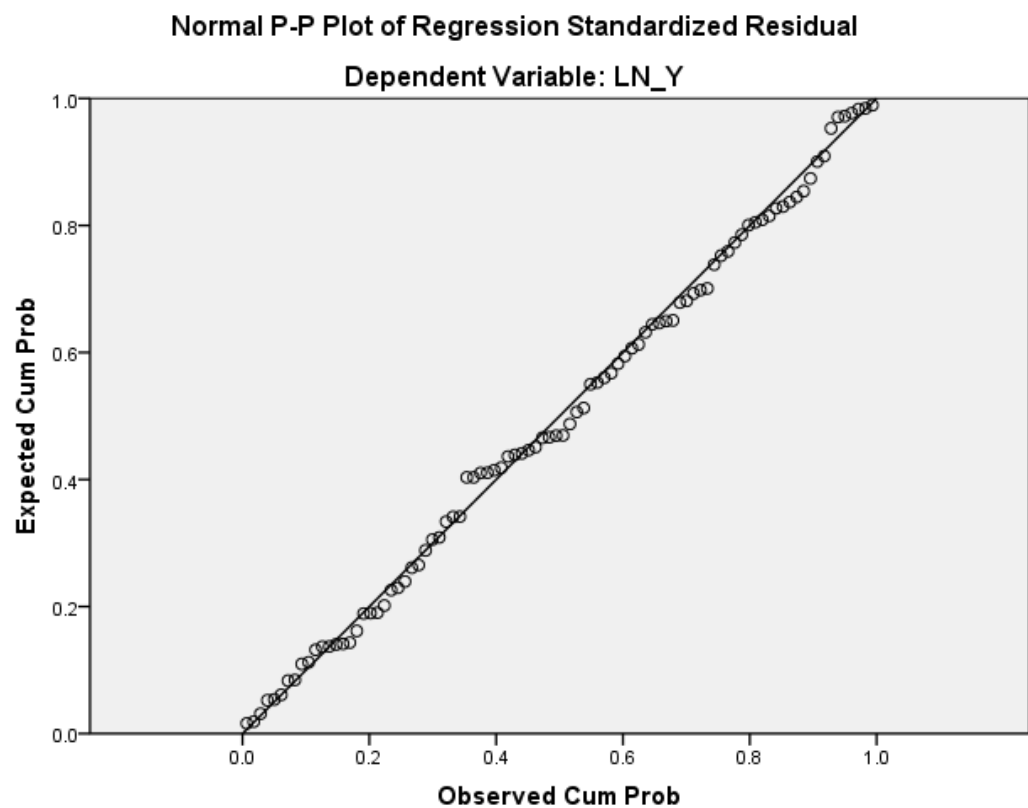
Descriptive Statistics					
	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	92	.170	.251	-.188	.498
Valid N (listwise)	92				

$$Ujiskewness = \frac{0,170}{\sqrt{\frac{6}{92}}} = 0,666$$

$$Uji Kurtosis = \frac{-0,188}{\sqrt{\frac{24}{92}}} = 0,368$$

## Lampiran 9

### Hasil Uji *Normal Probability Plot*



## Lampiran 10

### Hasil Uji Normal dengan *KolmogorovSmirnov*

Uji *KolmogorovSmirnov*  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.48903209
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.042
	Negative	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.517
Asymp. Sig. (2-tailed)		.952

## Lampiran 11

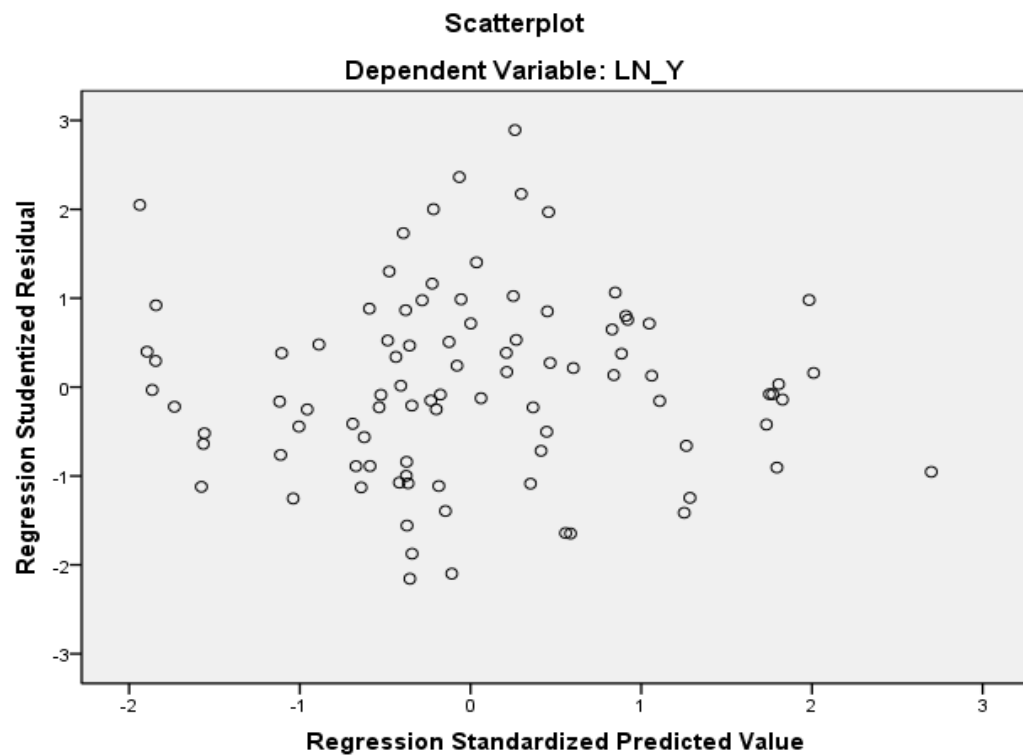
### Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_X1	.126	7.917
	LN_X2	.130	7.673
	LN_X3	.916	1.092

## Lampiran 12

### Hasil Uji Heterokedastisitas



## Lampiran 13

### Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.733 <sup>a</sup>	.538	.522	.49730	1.889

## Lampiran 14

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
B	Std. Error	Beta
16.652	1.959	
.659	.118	1.139
-.256	.121	-.423
-.222	.107	-.158

## Lampiran 15

### Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>				
Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta		
16.652	1.959		8.501	.000
.659	.118	1.139	5.586	.000
-.256	.121	-.423	-2.106	.038
-.222	.107	-.158	-2.087	.040

a. Dependent Variable: LN\_Y

## Lampiran 16

### Hasil Uji F

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.299	3	8.433	34.100	.000 <sup>a</sup>
	Residual	21.763	88	.247		
	Total	47.062	91			

a. Predictors: (Constant), LN\_X3, LN\_X2, LN\_X1

b. Dependent Variable: LN\_Y

## Lampiran 17

### Hasil Uji Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 <sup>a</sup>	.538	.522	.49730

a. Predictors: (Constant), LN\_X3, LN\_X2, LN\_X1

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Baiti Izzatinisa, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Desember 1990. Anak kelima dari pasangan Bapak Syamsuddin Sanusi dan Netty Chayati. Penulis ini mempunyai dua kakak perempuan dan dua kakak laki-laki. Bertempat tinggal di Jalan Kedondong nomor 8 RT/RW: 003/020, Harapan Baru Bekasi Barat 17133.

Penulis telah menempuh beberapa tingkat pendidikan formal, yaitu Sekolah Dasar Negeri 04 Pagi (1998-2003), Sekolah Menengah Pertama Negeri 284 Jakarta (2003-2006), Sekolah Menengah Atas Negeri 102 Jakarta (2006-2009), serta menjadi mahasiswa jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2009. Penulis ini memiliki pengalaman bekerja sebagai mahasiswa PKL di PT. Hexindo Adiperkasa, Tbk tahun 2012.